

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Papua Nugini merupakan negara yang memiliki hubungan bilateral yang cukup dekat, yang juga didukung oleh letak geografis yang saling berbatasan. Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini secara resmi mulai dilakukan sejak tahun 1986 dengan ditandatanganinya *Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea* pada tahun 1986.¹ Sebelum perjanjian itu pun, kedua negara telah memiliki perjanjian kerja sama lintas batas yang disetujui pada tahun 1973. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini berhak untuk melakukan aktivitas ataupun perdagangan lintas batas, baik untuk tujuan ekonomi ataupun kehidupan sosial.

Pemerintah pun mengakomodasi hubungan tersebut melalui pembangunan jalan raya Trans Papua yang salah satunya membentang dari Jayapura, yang berada di Papua, hingga ke Oksibil, yang berada di Papua Nugini.² Bahkan, pemerintah menetapkan beberapa titik perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sebagai

¹ Annisa Malawat, "Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea," *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional* 5, no. 1 (2020): 38–63, <http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/wanua/article/view/14070>.

² Melpayanty Sinaga, "Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan Barter Narkoba Di Kawasan Perbatasan RI – Papua New Guinea," *Masyarakat Indonesia* Vol. 45 (1 (2019): 61–74, <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/831>.

pos lintas batas negara (PLBN) yang digunakan sebagai jalur lintas batas resmi secara bebas. Dengan kondisi tersebut, setidaknya 75% dari wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.³ Akan tetapi, adanya hubungan bilateral yang dekat tidak membuat aktivitas di wilayah perbatasan kedua negara selalu kondusif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa masalah yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.

Muara Tami merupakan wilayah distrik yang berada di Kota Jayapura Provinsi Papua yang memiliki luas Wilayah 626 km² yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini. Karena berbatasan langsung maka hal ini menjadikan Muara Tami sebagai titik ksiksi kedua negara dalam bidang mobilitas penduduk melalui PLBN, perdagangan lintas batas dan juga diplomasi budaya. Akan tetapi dengan kemudahan tersebut Muara Tami juga menyimpan kompleksitas masalah yang terjadi seperti penyelundupan narkoba, wilayah yang diklaim menjadi tempat persembunyian KKB, aktivitas lintas batas ilegal dan masalah lainnya.⁴

Muara Tami juga telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas dalam program nasional penguatan wilayah perbatasan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya melalui pendekatan pembangunan dari wilayah terluar. Oleh sebab itu, studi yang difokuskan di kawasan ini memiliki potensi besar untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pusat di level lokal. Meskipun infrastruktur

³ Peter D. Dwyer and Monica Minnegal, "A Road, a Border, and Development in New Guinea," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 24, no. 4 (2023): 251–71, <https://doi.org/10.1080/14442213.2023.2227612>.

⁴ Muh. Irfan Syuhudi, "Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia - Papua Nugini Di Muara Tami Jayapura," *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 281, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.872>.

terus mengalami peningkatan dan peran TNI cukup dominan dalam menjaga stabilitas, mutu sumber daya manusia di Muara Tami masih belum sebanding dengan daerah lain di Indonesia.⁵

Adapun salah satu masalah transnasional yang mengharuskan kedua negara dalam bekerja sama adalah penyelundupan narkoba jenis ganja oleh oknum masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Ganja diselundupkan melalui jalur-jalur tikus atau tapal batas perbatasan yang tidak merata akibat kurangnya pemerataan infrastruktur pemerintah kedua negara. Adapun beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2014 ganja seberat 7,2kg yang dibawa oleh oknum kewarganegaraan Papua Nugini yang diselundupkan ke Indonesia. Pada tahun 2015 ganja seberat 4kg yang dibawa oleh warga Skouw. Pada tahun 2016 ganja seberat 1kg yang dibawa oleh warga Papua Nugini. Pada tahun 2017 Penyelundupan ganja seberat 500 gram dilakukan oleh seorang pemuda dari kampung Mosso. Pada tahun 2018 penyelundupan ganja seberat 3kg dibawa oleh warga Koya Timur Muara Tami. Sementara tahun 2019 seorang warga membawa ganja kepasar perbatasan Skouw di Distrik Muara Tami. Hingga akhir Juli 2019, data dari Unit Penelitian Narkoba Polresta Jayapura telah mengungkapkan 39 kasus dengan 47 tersangka pengedar narkoba. Para pelaku berasal dari berbagai latar belakang, seperti kasus seorang siswa berusia 11 tahun yang ditangkap karena membawa ganja melalui jalur ilegal dekat PLBN Skouw (2017) dan kasus lain di

⁵ Filemon Fajar Kusuma, Edy Saptono, and Effendi Sihole, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi Di Distrik Muara Tami Jayapura)," *Manajemen Pertahanan* 4, no. 1 (2018): 61–76.

mana pelintas batas/transporter (AT) adalah pelaku yang sudah dipenjara dengan kasus serupa.⁶

Masalah selanjutnya yang terjadi adalah kegiatan lintas batas ilegal atau masyarakat yang melakukan perpindahan wilayah negara tanpa dilengkapi dengan dokumen seperti pasport dan kegiatan lintas batas tersebut para oknum melewati jalan tapak atau jalan tikus. Adapun salah satu pemahaman masyarakat Papua dan Papua Nugini adalah karena keduanya masih tergolong dalam satu suku bangsa, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat dikepulauan ini masih terikat oleh suatu perasaan satu rumpun, yang dikenal dengan rumpun Melanesia. Berangkat dari pemahaman tersebut yang mendorong kegiatan lintas batas ilegal. Padahal jika ditelaah lebih lanjut PLBN Skouw yang berada di distrik Muara Tami sudah menyediakan pelayanan CIQS (Costum, Imigration, Quarantine dan Security) yang mana memudahkan para pelintas batas untuk melakukan kegiatan perpindahan penduduk yang secara sah oleh aturan negara.⁷

Masalah selanjutnya adalah kelompok separatis yang bersembunyi diwilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, kelompok separatis bersenjata atau yang lebih dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), merupakan salah satu ancaman signifikan bagi pemerintah Indonesia dan juga bagi Papua New Guinea dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Organisasi ini sering

⁶ Heni Batara Maya, Mohammad Kemal Dermawan, and Vinitia Susanti, "The Integrated Prevention Model for Marijuana Smuggling in Land Border Region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province)," *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (December 5, 2020), <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.18421>.

⁷ Salesius Jemaru and Herniati Cenne, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua," *Jurnal Ius Publicum* 3, no. 3 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.55551/jip.v3i3.19>.

melakukan aksi teror dan memanfaatkan wilayah Papua New Guinea untuk menghindari pengejaran oleh aparat keamanan Indonesia, terutama di kawasan perbatasan yang masih berupa hutan dan desa-desa kecil yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian. Meskipun demikian, terdapat beberapa insiden atau konflik ketika kelompok separatis ini bersembunyi di desa-desa di Papua New Guinea, termasuk pelanggaran batas negara dengan memasuki wilayah tanpa izin dan penyelundupan barang-barang ilegal, yang sering kali dilindungi oleh negara tersebut. Isu-isu ini biasanya dibahas dalam pertemuan antara Indonesia dan Papua New Guinea, serta dalam forum Joint Border Committee (JBC) antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi di Papua New Guinea. Keutuhan dan kedaulatan negara menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia melalui JBC, mengingat OPM terus menjadi ancaman nyata bagi kedua negara yang masih dapat diamati hingga saat ini dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.⁸

Masalah selanjutnya adalah kurangnya infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar di wilayah perbatasan Muara Tami. Mengapa kurangnya pemerataan infrastruktur merupakan sebuah masalah? karena sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG.

⁸ Muh. Ardhiansyah Putra and Zaky Ismail, "Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Melalui Joint Border Committee (JBC) Di Kawasan Perbatasan Merauke Pada 2018 – 2020," *Siyar Journal*, 2022, <https://jurnal.fisip.uinsa.ac.id/index.php/siyar/article/view/256>.

Kemudian Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Sehingga seharusnya masyarakat bisa merasakan adanya pembangunan infrastruktur sepanjang daerah perbatasan seperti akses jalan kedua negara dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, pos-pos militer di perbatasan, imigrasi, bea cukai, karantina dan keamanan.⁹

Dengan begitu, beberapa masalah diatas merupakan kejahatan transnasional yang mana dibutuhkan kerjasama oleh kedua negara dalam penyelesaian masalah perbatasan yang terjadi. Sehingga Indonesia dan Papua Nugini melakukan penandatanganan perjanjian internasional dan juga melakukan beberapa kerjasama seperti perjanjian bilateral "*Treaty of Mutual Respect, Friendship, Cooperation between The Republic of Indonesia and The Independent state of Papua Nugini*" yang mana perjanjian tersebut adalah Perjanjian ini merupakan kesepakatan bilateral yang signifikan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Ditandatangani pada tahun 1986, perjanjian ini menekankan saling menghormati terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik masing-masing negara. Perjanjian ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk kolaborasi di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, budaya, dan keamanan. Perjanjian ini mengakui pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di daerah perbatasan, terutama menghadapi tantangan seperti kejahatan lintas batas

⁹ Annisa Malawat, *op.cit.*, hal 48

dan gerakan separatis. Dengan mendorong kerja sama dalam penegakan hukum dan pengembangan ekonomi, kedua negara berupaya meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di sepanjang perbatasan. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama sambil tetap menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong dialog mengenai isu-isu regional serta inisiatif bersama yang dapat menguntungkan kedua negara, terutama dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat kedekatan geografis kedua negara.¹⁰

Selanjutnya selain perjanjian diatas, Indonesia dan Papua Nugini juga melakukan kerjasama perbatasan seperti Join Border Commite, Border Liaison Meeting (BLM), Joint Technical Sub Committee on Security Matters along to the Common, Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation and Mapping (JTSC-SDM). Beberapa kerjasama tersebut merupakan upaya kedua negara dalam menyelesaikan masalah transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.¹¹

Sejak tahun 2014 kedua negara menyepakati Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG yang menjadi awal mula kedua negara menjalin kerjasama sampai dengan sekarang, akan tetapi permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data dari Unit Penelitian Narkoba Polresta Jayapura dapat dilihat pada tahun 2014 sampai dengan

¹⁰ Petrus K. Farneubun, "Indonesia-Png Cooperation: Papua Strategic Roles," *KnE Social Sciences* 1, no. 1 (2016): 154–61, <https://doi.org/10.18502/kss.v1i1.447>.

¹¹ Volume Issue, Dewa Gede, and Sudika Mangku, "Implementaton of Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (c-Dr) Greement Etween Indonea - Mor Ete In He Eoluton f He and Order Pute" 8, no. 30 (2020).

sekarang masalah peredaran narkoba terus meningkat yang mana masalah peredaran narkoba tersebut merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan. Berangkat dari masalah transnasional yang belum sepenuhnya teratasi dengan adanya implementasi kerja sama yang telah dijalin, maka penulis ingin mengetahui kerjasama yang dijalin oleh kedua negara untuk menyelesaikan masalah yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pernyataan rumusan masalah di atas yang menjadi pernyataan yang akan diulas oleh penulis adalah "*Apa saja bentuk kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan Muara Tami?*"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan perbatasan di distrik Muara Tami melalui variabel *Multiple Channels*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kerjasama Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan perbatasan di distrik Muara Tami sehingga dapat dijadikan referensi pemerintah kedepannya mendapat perhatian lebih. selanjutnya dapat digunakan sebagai inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap topik penelitian terkait.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian terdahulu atau *literature review* pada penelitian-penelitian yang relevan dan memiliki topik yang sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ini dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi dan bahan pembanding agar topik penelitian ini memiliki perbedaan atau pembaruan didalamnya.

Penelitian pertama, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Annisa Malawat berjudul **“Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea”**.¹²Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui forum kerja sama bilateral yang disebut Border Liaison Meeting (BLM). Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana forum BLM digunakan sebagai sarana strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan dan pelintas batas di wilayah perbatasan, terutama di Provinsi Papua. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Distrik Muara Tami, khususnya Skouw-Wutung, yang merupakan pintu lintas batas resmi antara Indonesia dan Papua Nugini. Dalam kajiannya, Malawat menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis kualitatif deduktif. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori politik luar negeri James Rosenau, konsep keamanan nasional dari Barry Buzan yang mencakup lima sektor (militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan), serta teori

¹² Annisa Malawat, *op.cit.*, hal 38

perbatasan dari A.E. Moodie dan Kristof, yang membedakan antara *boundary* dan *frontier* dalam konteks geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Papua Nugini melalui forum BLM telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketegangan di perbatasan. Isu-isu seperti penyelundupan senjata, pelintas batas ilegal, dan aktivitas kelompok separatis seperti OPM menjadi pokok pembahasan dalam forum tersebut. Forum BLM juga menghasilkan berbagai kesepakatan konkret, antara lain pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, patroli bersama, pertukaran informasi keamanan, dan penguatan peran aparat imigrasi dan karantina. Pertemuan tahunan BLM terbukti memperkuat koordinasi lintas batas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berjudul “*Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami.*” Fokus wilayah dalam kedua penelitian sama-sama membahas Muara Tami sebagai lokasi utama kerja sama bilateral. Selain itu, forum BLM yang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu, juga menjadi dasar evaluasi terhadap kerja sama dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian Malawat memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat, terutama dalam memahami bentuk-bentuk kerja sama bilateral dan dinamika keamanan di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

Penelitian kedua, merupakan merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Lindriani Marsyanti Kawab berjudul “**Dampak Kerjasama Bilateral dan Implementasi BLM (Border Liaison Meeting) dalam Pertahanan dan**

Keamanan Indonesia-PNG".¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi forum *Border Liaison Meeting* (BLM) berdampak terhadap penguatan pertahanan dan keamanan nasional, khususnya pada wilayah perbatasan darat yang kerap mengalami kerawanan dan potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk laporan hasil BLM dari tahun 2013 hingga 2022, serta berbagai nota kesepahaman yang telah disepakati antara kedua negara. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah kerja sama yang dibangun melalui forum BLM, terutama dalam hal peningkatan keamanan wilayah perbatasan, patroli gabungan, pengawasan pelintas batas, pembangunan infrastruktur strategis, serta penyelesaian konflik yang timbul akibat pelanggaran batas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Papua Nugini melalui BLM memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari adanya kesepakatan terkait pembangunan pos perbatasan, peninjauan ulang perjanjian penyeberangan tradisional, serta pertukaran informasi antara aparat keamanan kedua negara. Selain itu, forum BLM juga menjadi media koordinatif dalam menyelesaikan berbagai isu keamanan yang bersifat lintas negara, seperti penyelundupan, kejahatan terorganisir, dan aktivitas separatis. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa implementasi dari sebagian besar kesepakatan yang dihasilkan belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga diperlukan komitmen lanjutan dari

¹³ Lindriani Marsyanti Kawab, "Dampak Kerjasama Bilateral Dan Implementasi Blm (Border Liaison Meeting) Dalam Pertahanan Dan Keamanan Indonesia-PNG," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2023, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

kedua belah pihak. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian penulis yang sedang dilakukan, yang berjudul “*Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami.*” Keterkaitan terletak pada fokus wilayah yang sama, yaitu perbatasan darat Indonesia–Papua Nugini, khususnya di wilayah Skouw–Muara Tami, serta penggunaan forum BLM sebagai objek utama kajian. Penelitian Lindrian Marsyanti Kawab menjadi dasar penting dalam memberikan gambaran awal mengenai mekanisme kerja sama bilateral yang telah terjalin, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kerja sama tersebut dalam mengatasi permasalahan konkret yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian terdahulu ini memberikan landasan konseptual dan empiris yang bermanfaat dalam mendukung kerja sama lintas batas kedua negara.

Penelitian ketiga, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Novana Veronika Julenta Kareth berjudul “**Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas Batas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua Nugini**”.¹⁴Jurnal ini mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, khususnya di Pos Lintas Batas Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengelolaan perbatasan dilaksanakan terhadap para pelintas batas, baik yang resmi maupun tidak resmi, serta bagaimana keberadaan sistem hukum yang ada menanggapi tantangan sosial budaya masyarakat

¹⁴ Novana Veronika Julenta Kareth, “Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas Di Wilayah Perbatasan Papua Dan Papua New Guinea,” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 27, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.848>.

perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan berlokasi di Kota Jayapura. Melalui metode ini, Veronika tidak hanya menelaah aturan hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengamati efektivitas implementasinya di lapangan serta persepsi masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan selama ini cenderung menekankan pada pendekatan keamanan dan ekonomi, namun mengabaikan variabel identitas budaya lokal. Hal ini memunculkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan negara, yang tercermin dari masih maraknya pelintas batas ilegal melalui jalur tidak resmi atau “jalan tikus.” Veronika berpendapat bahwa pengelolaan perbatasan yang efektif seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih integratif. Mengacu pada teori *border governance* dari Brunet-Jailly, penelitian ini menekankan pentingnya dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam tata kelola perbatasan. Salah satu temuan penting adalah bahwa hubungan kekerabatan dan kesamaan etnis antara warga Papua dan Papua Nugini mendorong praktik pelintas batas yang tidak selalu bisa dikendalikan melalui pendekatan hukum formal. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini relevan untuk mendukung penelitian penulis yang berjudul “*Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami.*” Keduanya sama-sama membahas wilayah perbatasan di Muara Tami, serta menyoroti problematika pelintas batas ilegal, pengawasan terhadap aktivitas lintas batas, dan pentingnya kerja sama lintas negara. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang mana Veronika berfokus pada aspek hukum dan sosial budaya, sementara penelitian ini mengevaluasi

efektivitas kerja sama bilateral. Namun, temuan Veronika bahwa pendekatan hukum tidak akan efektif tanpa pemahaman budaya lokal menjadi kontribusi penting untuk memperkaya analisis efektivitas kerja sama antar negara di kawasan tersebut.

Penelitian keempat, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Wujud Wiyono dan Taufiq Supriyanto berjudul **“Implications of the PNG-US Defense Pact for Indonesia's Sovereignty and National Interests”**.¹⁵ Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas peningkatan kerja sama militer PNG–AS yang memungkinkan kehadiran pasukan militer AS di fasilitas udara dan pelabuhan PNG. Situasi ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan dan dinamika keamanan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kehadiran militer asing di negara tetangga dapat memengaruhi posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, serta bagaimana pemerintah Indonesia dapat menyikapi dinamika tersebut secara diplomatik dan pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan antara PNG dan AS menimbulkan potensi ketegangan regional, memicu persaingan geopolitik antara kekuatan besar (AS dan Cina), serta mempersempit ruang gerak Indonesia dalam menerapkan politik luar negeri bebas-aktif. Kehadiran militer asing di dekat perbatasan juga dikhawatirkan mengganggu

¹⁵ Wujud Wiyono and Taufiq Supriyanto, “Implications of the PNG-US Defense Pact for Indonesia’s Sovereignty and National Interests,” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology* 2, no. 5 (May 24, 2024): 531–44, <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i5.9302>.

jalur pelayaran strategis Indonesia serta memperlemah posisi diplomatik Indonesia di kawasan. Penelitian ini menekankan pentingnya diplomasi proaktif, penguatan pertahanan maritim nasional, dan kerja sama keamanan regional sebagai respons strategis yang harus diambil Indonesia. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai kerja sama Indonesia–Papua Nugini, karena keduanya membahas isu-isu perbatasan dan stabilitas kawasan. Meski tidak membahas efektivitas kerja sama bilateral secara teknis seperti dalam forum *Border Liaison Meeting*, artikel ini memberikan konteks geopolitik dan ancaman eksternal yang penting dalam mengevaluasi sejauh mana kerja sama Indonesia–PNG benar-benar mampu menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Muara Tami. Dengan demikian, penelitian Wiyono dan Supriyanto dapat dijadikan sebagai landasan geopolitik dan strategi pertahanan dalam mengkaji kerja sama bilateral di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Penelitian kelima, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Melyana Ratana Pugu dan Yanyan Mochamad Yani berjudul “**Human Security For Border Society: A Case Study At Waris Community At The Borders Of RI-PNG**”.¹⁶ Penelitian ini secara khusus mengkaji dinamika masyarakat perbatasan di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua suatu wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Fokus utama kajian ini terletak pada permasalahan keamanan manusia (human security), dengan penekanan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai indikator utama ketimpangan pembangunan dan

¹⁶ Melyana Ratana Pugu and Yanyan Mochamad Yani, “Human Security For Border Society: A Case Study At Waris Community At The Borders Of RI-PNG,” *Jurnal Asia Pacific Studies* 3, no. 1 (July 5, 2019): 11, <https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.972>.

marginalisasi masyarakat perbatasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi objektif masyarakat perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar negara, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menata dan memperkuat kapasitas wilayah perbatasan. Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan pada pendekatan human security dalam studi hubungan internasional, sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang meliputi dimensi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini diperkuat oleh pandangan Barry Buzan (1998) mengenai keamanan non-tradisional yang mencakup stabilitas sosial-politik serta keberlanjutan identitas dan kesejahteraan masyarakat. Penulis juga mengintegrasikan pemikiran tentang *interdependensi* dan *interpenetrasi* dalam tata kelola negara kontemporer, yang menunjukkan bahwa kebijakan domestik suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh eksternal, termasuk dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan. Pendekatan *civil society* dan *pemberdayaan komunitas* juga digunakan untuk menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Distrik Waris mengalami kerentanan struktural yang serius. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya fasilitas sekolah, minimnya jumlah tenaga pendidik, serta tidak berfungsinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi indikator lemahnya kehadiran negara di wilayah tersebut. Di sektor kesehatan, keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta sulitnya akses transportasi memperburuk situasi. Selain itu, kondisi geografis yang terisolasi

semakin menegaskan ketertinggalan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan jalan penghubung antardesa. Keseluruhan kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat perbatasan di Waris hidup dalam situasi yang rentan dan belum memperoleh jaminan hak-hak dasar secara optimal. Relevansi penelitian ini terhadap studi yang berjudul *Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami* terletak pada kesamaan konteks geografis, yaitu kawasan perbatasan RI–PNG, serta fokus pada tantangan pembangunan wilayah perbatasan. Penelitian Melyana Ratana Pugu dan Yani memberikan kontribusi penting sebagai landasan empiris dan konseptual untuk mengidentifikasi tantangan yang serupa di Muara Tami. Dengan demikian, temuan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif kerja sama bilateral Indonesia–PNG dalam mengatasi permasalahan perbatasan, serta merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Penelitian keenam, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Usman Pakasi berjudul **“Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea (RI – PNG) (Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow-Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua)”**.¹⁷ Penelitian ini mengangkat isu strategis terkait identifikasi potensi sumber konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, dengan

¹⁷ Usman Pakasi, “Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (Ri-Png) (Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow-Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua),” 2018, https://core.ac.uk/outputs/327194102/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

fokus khusus pada wilayah Skow-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi fenomenologis, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai bentuk permasalahan yang dapat memicu ketegangan, baik dalam konteks hubungan bilateral antarnegara maupun dalam dinamika sosial di tingkat lokal. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa sejumlah persoalan krusial seperti kepemilikan hak ulayat oleh warga negara PNG di dalam wilayah administrasi Indonesia, maraknya pelintas batas ilegal, peredaran narkoba dan senjata tajam, serta praktik kewarganegaraan ganda, menjadi titik-titik rawan konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Selain itu, keberadaan tenaga kerja asing dari PNG, penggunaan mata uang kina di pasar perbatasan, ketimpangan akses transportasi, dan kesenjangan kesejahteraan antara penduduk lokal dan pendatang turut memperburuk ketegangan sosial di wilayah tersebut. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual konflik sosial yang mengacu pada pandangan Suprihanti, Wirawan, dan Miall dkk., yang menekankan bahwa konflik dapat muncul dari ketidakseimbangan kebutuhan, akses sumber daya, serta perbedaan nilai dan kepentingan. Peneliti menyoroti bahwa lemahnya tata kelola perbatasan, terutama dalam distribusi kewenangan dan pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral, justru memperkuat orientasi masyarakat lokal untuk lebih berinteraksi secara sosial dan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini menimbulkan risiko degradasi nasionalisme dan memperbesar potensi konflik antar komunitas maupun antar negara. Temuan dari studi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penelitian penulis yang berfokus pada efektivitas kerja sama bilateral Indonesia dan Papua Nugini dalam

menangani persoalan perbatasan di Muara Tami. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis dan dinamika sosial yang serupa, khususnya dalam hal mobilitas lintas batas, ketimpangan pembangunan, serta tantangan dalam pengelolaan identitas dan keamanan. Penelitian Usman Pakasi dapat dijadikan pijakan empiris untuk menilai sejauh mana kerja sama antara kedua negara mampu mereduksi potensi konflik dan menjamin stabilitas kawasan perbatasan. Dengan demikian, integrasi temuan ini akan memperkuat landasan analitis penelitian penulis, khususnya dalam merumuskan model kerja sama lintas batas yang lebih efektif, adil, dan juga berkelanjutan.

Penelitian ketujuh, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Heny Batara Maya, Mohammad Kemal Dermawan dan Vinita Susanti berjudul **“The Integrated Prevention Model for Marijuana Smuggling in Land Border Region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province)”**.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada perumusan model pencegahan kejahatan yang komprehensif terhadap penyelundupan ganja di kawasan perbatasan darat Indonesia–Papua Nugini, khususnya di Distrik Muara Tami. Kajian ini muncul sebagai respons atas lemahnya efektivitas model *outward-looking* yang selama ini diterapkan, yakni model pemeriksaan dan pengawasan lintas batas yang mengandalkan koordinasi institusional secara horizontal namun belum terintegrasi secara vertikal dan struktural. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode *Delphi* dan wawancara tak terstruktur untuk memperoleh konsensus dari para ahli, tokoh adat (Ondoafi), aparat keamanan, dan warga perbatasan

¹⁸ Maya, Dermawan, and Susanti, *op.cit.*, hal 687

mengenai kelemahan model yang ada serta merumuskan strategi penguatan model terpadu. Secara teoritik, penelitian ini merujuk pada pendekatan kriminologi struktural dan teoritik netralisasi perilaku menyimpang, yang menjelaskan bahwa para pelaku penyelundupan ganja tidak melihat tindakan tersebut sebagai kejahatan karena adanya rasionalisasi sosial dan keuntungan ekonomi. Penelitian ini juga menggambarkan dinamika kompleks di wilayah perbatasan, termasuk keterlibatan jaringan sosial yang longgar antara pelintas batas, lemahnya pengawasan terhadap jalur tradisional, serta ketidakterpaduan antar kementerian/lembaga dalam hal anggaran, program, dan penegakan hukum. Permasalahan sosial seperti minimnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin memperparah situasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak akan efektif apabila masih diwarnai ego sektoral antar instansi dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat perbatasan. Maka dari itu, model pencegahan yang diusulkan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan peran tokoh lokal, penyediaan pendidikan dan sosialisasi hukum, serta pembentukan unit BNN di wilayah perbatasan. Model ini juga menekankan pentingnya diplomasi perbatasan dan kerja sama bilateral Indonesia–Papua Nugini dalam memitigasi peredaran narkoba lintas batas. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian penulis yang berjudul *Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami*. Keduanya sama-sama menyoroti Distrik Muara Tami sebagai ruang geografis yang strategis namun rentan terhadap berbagai permasalahan lintas batas, terutama yang berkaitan dengan keamanan,

kriminalitas, dan integrasi sosial. Kontribusi utama penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada pemberian kerangka konseptual dan operasional dalam menilai sejauh mana kerja sama bilateral mampu merespons persoalan aktual di lapangan. Selain itu, model terpadu yang ditawarkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menilai kebijakan lintas negara yang telah dan sedang dijalankan di kawasan perbatasan Muara Tami.

Penelitian kedelapan, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Muh. Ardhiansyah Putra dan Zaky Ismail berjudul “**Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Guinea Melalui *Joint Border Committee* (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 – 2020**”.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada kepentingan strategis Indonesia terhadap Papua Nugini dalam konteks kerja sama bilateral yang dijalankan melalui forum *Joint Border Committee* (JBC) di kawasan perbatasan Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis interaksionis Miles dan Huberman, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motivasi Indonesia dalam memperkuat kehadiran negara serta menjaga stabilitas kawasan perbatasan dari potensi ancaman. Dalam hal ini, kepentingan nasional didefinisikan sebagai upaya melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta mengamankan garis batas dari gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri seperti separatisme maupun dari luar negeri melalui pelanggaran batas wilayah. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep *kepentingan nasional* sebagaimana dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, di mana setiap tindakan negara dalam

¹⁹ Muh. Ardhiansyah Putra and Zaky Ismail, *op.cit.*, hal 29

hubungan internasional didorong oleh dorongan untuk mempertahankan kekuasaan, stabilitas, dan keamanan nasional. Dalam konteks JBC, forum ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola dinamika perbatasan, termasuk menyelesaikan permasalahan seperti pelintas batas ilegal, penyelundupan, dual citizenship, serta pembangunan sarana perbatasan yang efektif seperti PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Selain itu, kerja sama ini juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan melalui pembangunan pasar rakyat, pelayanan kesehatan, serta integrasi sektor imigrasi, bea cukai, dan keamanan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa JBC merupakan wujud konkret dari komitmen bilateral Indonesia–Papua Nugini dalam menciptakan tata kelola perbatasan yang stabil dan produktif. Kesepakatan yang dicapai dalam forum ini tidak hanya menyangkut aspek teknis batas wilayah, tetapi juga menjadi upaya diplomasi keamanan untuk mencegah berkembangnya gerakan separatisme serta mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap memanfaatkan celah geografis perbatasan. Selain itu, kegiatan JBC juga berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui program-program pembangunan yang bersifat lintas batas. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis yang berjudul “*Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami*” sangat erat, mengingat keduanya berfokus pada pentingnya forum kerja sama bilateral dalam menangani kompleksitas perbatasan RI–PNG. Penelitian Putra dan Ismail memperlihatkan bagaimana JBC tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultatif, tetapi juga sebagai mekanisme implementatif dalam menjawab persoalan lintas

batas yang multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi analisis kerja sama Indonesia–Papua Nugini dalam menangani isu-isu perbatasan, termasuk di wilayah Muara Tami yang memiliki tantangan serupa.

Penelitian kesembilan, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku berjudul **“Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini”**.²⁰ Fokus utama dari kajian ini terletak pada evaluasi kinerja BNPP sejak pendiriannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana BNPP mampu menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan strategis perbatasan, khususnya di Papua yang berbatasan langsung dengan PNG. Dalam kajian ini, Mangku menggunakan teori *boundary making* dari Stephen B. Jones yang membagi proses pengelolaan perbatasan menjadi empat tahapan: alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Teori ini memberi kerangka analisis yang kuat dalam menjelaskan kompleksitas pengelolaan perbatasan yang mencakup aspek hukum internasional, teknis geospasial, dan kebijakan publik. Penelitian ini juga menyoroti bahwa permasalahan perbatasan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga multidimensi terkait dengan persoalan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Hasil penelitian

²⁰ Dewa Gede Sudika M, “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (Bnpp) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini Dewa Gede Sudika Mangku,” 2020, <https://digitallibrary.ump.ac.id/910/2/13>. Full Paper - Dewa Gede Sudika Mangku.pdf.

menunjukkan bahwa meskipun BNPP telah diberikan kewenangan legal yang luas, pelaksanaan tugasnya masih belum optimal. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal masyarakat perbatasan. Selain itu, pendekatan BNPP yang menggunakan tiga pilar utama keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan—belum sepenuhnya berjalan sinergis. Kasus-kasus konkret seperti sengketa tapal batas, pelintas batas ilegal, serta keterlibatan warga negara PNG dalam aktivitas ilegal di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah rawan seperti Skouw hingga Merauke, termasuk Distrik Muara Tami. Relevansi penelitian ini sangat signifikan terhadap penelitian penulis yang menelaah kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam konteks penanganan masalah perbatasan di Muara Tami. Temuan Dewa Gede Sudika menegaskan bahwa kelemahan tata kelola dalam pengelolaan internal oleh lembaga domestik seperti BNPP perlu dilengkapi dengan penguatan kerja sama lintas negara melalui forum-forum bilateral seperti *Joint Border Committee (JBC)*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas perspektif mengenai keterkaitan antara kapasitas kelembagaan nasional dan efektivitas diplomasi perbatasan dalam menyelesaikan isu-isu di kawasan strategis seperti Muara Tami.

Penelitian kesepuluh, merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Kemas Muhammad Yusri berjudul **“Pertautan Kebijakan Imigrasi dan Hukum Serta**

Tantangan Dalam Penegakannya di Perbatasan Indonesia – Papua Nugini”²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menelaah sejauh mana regulasi nasional dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial budaya masyarakat perbatasan yang memiliki hubungan kekerabatan lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran batas oleh pelintas tradisional yang tidak memiliki dokumen resmi masih kerap terjadi, meskipun telah tersedia fasilitas keimigrasian di PLBN Skouw. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan pola pikir masyarakat yang masih menempatkan nilai budaya dan hak ulayat di atas aturan formal negara. Secara konseptual, penelitian ini memanfaatkan kerangka *border governance* yang dikembangkan oleh Brunet-Jailly, yang menekankan pentingnya integrasi antara empat dimensi dalam pengelolaan perbatasan: kekuatan pasar dan arus perdagangan, aktivitas kebijakan pemerintah, kekuatan politik masyarakat lokal, serta budaya khas masyarakat perbatasan. Dalam konteks Muara Tami, keempat dimensi tersebut saling terjalin dan menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya ketika aturan keimigrasian bersinggungan dengan tradisi lintas batas komunitas etnis Melanesia yang tersebar di kedua sisi negara. Meskipun Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati kerja sama melalui forum *Joint Border Committee (JBC)*, pelaksanaannya masih menghadapi kendala di tingkat akar rumput karena perbedaan persepsi antara norma negara dan praktik komunitas lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa

²¹ Kemas Muhammad Yusri, *Pertautan Kebijakan Imigrasi Dan Hukum Serta Tantangan Dalam Penegakannya Perbatasan Indonesia – Papua Nugini, Politics At The Edge* (Jurnal Hukum Staatrechts, 2024), <https://doi.org/10.1057/9780333981689>.

penyelesaian persoalan perbatasan tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan atau penegakan hukum semata, melainkan perlu melibatkan strategi diplomatik, pembangunan terintegrasi, serta pendekatan budaya yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Program seperti *Cross Border Tourism Festival* dan pengembangan pasar perbatasan telah menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, integrasi sosial, dan pengurangan dukungan terhadap gerakan separatistis. Namun demikian, peneliti mencatat bahwa pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus) dan ketegasan terhadap pelanggaran keimigrasian masih memerlukan penguatan. Penelitian milik Dewa Gede Sudika memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian penulis mengenai kerja sama bilateral Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan di Muara Tami. Temuan Dewa Gede Sudika memberikan landasan empiris yang menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama lintas negara bergantung pada keselarasan antara kebijakan nasional, sensitivitas budaya lokal, dan keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konteks implementasi kerja sama bilateral secara lebih komprehensif di kawasan strategis Muara Tami.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Annisa Malawat berjudul “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea”	Jenis penelitian: deskriptif analisis kualitatif Pendekatan: <i>foreign policy</i>	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perhatian yang besar terhadap wilayah perbatasan telah mengubah persepsi bahwa perbatasan adalah bagian belakang suatu negara. Saat ini, wilayah perbatasan dipandang sebagai beranda terdepan yang mencerminkan eksistensi Indonesia. Pengelolaan perbatasan pun berdampak langsung pada peningkatan keamanan nasional Indonesia, yang didasarkan pada kerjasama bilateral dalam pengelolaan perbatasan untuk mengurangi ancaman dan masalah keamanan di perbatasan Indonesia-Papua New Guinea.
2.	Lindriani Marsyanti Kawab berjudul “Dampak Kerjasama Bilateral dan Implementasi BLM (Border Liaison Meeting) dalam Pertahanan dan Keamanan Indonesia-PNG”	Jenis penelitian: kualitatif Pendekatan: kerjasama bilateral	Hasil dari Implementasi Border Liaison Meeting (BLM) antara Indonesia dan Papua Nugini dimulai pada tahun 2013, di mana kedua negara masih membahas agenda dari tahun 2012 terkait keamanan. Upaya peningkatan keamanan dalam BLM tahun 2013 terlihat melalui pertukaran informasi yang menekankan pentingnya patroli gabungan untuk menjaga lebih dari 800 km perbatasan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan militer untuk meningkatkan pengawasan dengan menambah pos-pos perbatasan dan personel PAMTAS sebagai penjaga keamanan, serta memperkuat kerjasama antara aparat keamanan kedua negara.
3.	Novana Veronika Julenta Kareth berjudul “Penegakan Hukum Oleh Pos Lintas Batas Bagi Para Pelintas Batas di Wilayah Perbatasan Papua dan Papua Nugini”	Jenis penelitian: yuridis sosisologis Pendekatan:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan perbatasan sering kali mengabaikan aspek identitas budaya. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan identitas budaya mereka sebagai cara

		konsep cross border governance	untuk menantang pandangan dan kebijakan dominan yang ditetapkan oleh negara dalam pengelolaan perbatasan. Fenomena seperti "jalan tikus" dan berbagai jaringan interaksi lintas batas lainnya, yang dianggap ilegal oleh negara, menjadi bukti dari hal ini. Pendekatan budaya dalam kebijakan pengelolaan perbatasan seharusnya menjadi landasan bagi kebijakan keamanan, politik, dan ekonomi yang diterapkan. Sebagai konsekuensi praktis dari kajian ini, pengelolaan perbatasan perlu beralih dari pendekatan yang berfokus pada keamanan ekonomi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi.
4.	Wujud Wiyono dan Taufiq Supriyanto berjudul “Implications of the PNG-US Defense Pact for Indonesia's Sovereignty and National Interests”	Jenis penelitian: kualitatif Pendekatan: <i>national interest</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pakta Pertahanan antara Papua Nugini dan Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Ancaman terhadap Kedaulatan, Kehadiran pangkalan militer asing di dekat perbatasan Indonesia dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di area perbatasan dan perairan strategis. Dampak pada Kebijakan Luar Negeri, Indonesia perlu mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang proaktif untuk melindungi kepentingan nasionalnya, yang mencakup penguatan diplomasi, kerjasama keamanan regional, dan peningkatan pertahanan maritim.
5.	Melyana Ratana Pugu dan Yanyan Mochamad Yani berjudul “Human Security For Border Society: A Case Study At Waris Community At The Borders Of RI-PNG”	Jenis penelitian: kualitatif Pendekatan: <i>regional security</i>	Hasil dari penelitian ini adalah ancaman kemanusiaan bagi masyarakat di distrik waris yang juga berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini yang serba kurang dalam mendapatkan fasilitas pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan yang sangat

			mendukung perkembangan masyarakat di wilayah perbatasan.
6.	Usman Pakasi berjudul “Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea (RI – PNG) (Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow-Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua)”	Jenis penelitian: deskriptif kualitatif Pendekatan: konsep perbatasan dan teori konflik	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh kedua negara dalam menyelesaikan fenomena di wilayah perbatasan khususnya di distrik Muara Tami, masalah yang sangat sering terjadi adalah peredaran Kina (mata uang) PNG, peredaran narkoba, terdapat jalan tikus yang disalahgunakan sebagai pelintas batas ilegal. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perbatasan.
7.	Heny Batara Maya, Mohammad Kemal Dermawan dan Vinita Susanti berjudul “The Integrated Prevention Model for Marijuana Smuggling in Land Border Region of Indonesia-Papua Nugini (Case: Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province)”	Jenis penelitian: kualitatif wawancara tidak terstruktur dengan metode delphi Pendekatan: Delphi	Hasil dari penelitian ini menjelaskan perlunya model pencegahan yang efektif dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Model yang diterapkan saat ini adalah model yang berorientasi keluar yang mengimplementasikan pemeriksaan, pengawasan, dan keamanan lintas batas secara terpadu. Meskipun upaya ini dilakukan, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih menjadi masalah serius di daerah perbatasan. Dengan menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi, penelitian ini memperoleh data akurat yang menunjukkan bahwa model yang ada saat ini belum terlihat profesional dan terintegrasi antara petugas pelayanan lintas batas, kepolisian, angkatan pertahanan (TNI), pemimpin adat

			(Ondoaffi), pemimpin agama, dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini.
8.	Muh. Ardhiansyah Putra dan Zaky Ismail berjudul “ Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 – 2020 ”	Jenis penelitian: kualitatif Pendekatan: <i>national interest</i>	Hasil penelitian ini adalah kepentingan nasional Indonesia terhadap Papua Nugini dalam konteks kerja sama lintas batas melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke pada tahun 2018 hingga 2020 adalah upaya untuk melindungi dan menjaga integritas serta kedaulatan negara, sekaligus mengamankan perbatasan dari gangguan dan ancaman baik dari dalam negeri maupun negara lain. Hal ini penting mengingat wilayah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap konflik internal dan berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut mencakup keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM), isu-isu terkait perbatasan, aspirasi kemerdekaan yang muncul di kalangan sebagian masyarakat Papua, serta dukungan dari negara-negara Pasifik untuk pemisahan Papua dari Indonesia. Jika gangguan dan ancaman ini tidak ditangani, dapat berdampak negatif pada stabilitas nasional Indonesia secara keseluruhan.
9.	Dewa Gede Sudika Mangku berjudul “ Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini ”	Jenis penelitian: normatif data sekunder Pendekatan: teori pengelolaan perbatasan	Hasil dari penelitian ini adalah, BNPP memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan perbatasan sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola perbatasan, peran BNPP, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memberikan dampak nyata bagi kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Peran BNPP di wilayah perbatasan ini perlu sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal jika tidak, program-

			program pengelolaan perbatasan yang dirancang oleh pemerintah melalui BNPP akan kurang efektif dan terkesan sia-sia.
10.	Kemas Muhammad Yusri berjudul “Pertautan Kebijakan Imigrasi dan Hukum Serta Tantangan Dalam Penegakannya di Perbatasan Indonesia – Papua Nugini”	Jenis penelitian: yuridis sosisologis Pendekatan: <i>prospeIndonesiaty approach</i>	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan PLBN Skouw dalam mengatur keimigrasian bagi masyarakat selaku pelintas batas negara, meskipun begitu aturan negara tidak dapat berjalan mulus akibat adanya jalan tikus atau tapal batas yang masih bolong-bolong sehingga banyak disalah gunakan oleh oknum di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini khususnya Distrik Muara tami hingga saat ini terdapat 4 jalan tikus.
11.	Abdullah berjudul “Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini Dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan Di Muara Tami”	Jenis penelitian: Eksplanasi Pendekatan: Complex Interdependence	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan perbatasan di Muara Tami dengan menggunakan Variabel multiple channels yang ada dalam teori Complex Interdependence.

Sumber : Tabel dibuat dan diolah sendiri oleh penulis berdasarkan sumber terdahulu yang relevan dengan penelitian

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Complex Interdependence

Teori complex interdependence pada awalnya muncul sebagai anti tesis dari pandangan realisme tradisional yang cenderung fokus pada kekuatan militer. Dalam buku *Power dan Interdependence*, Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh para aktor merupakan bentuk jalan keluar untuk mencapai kepentingan nasional maupun penyelesaian suatu permasalahan selain menggunakan kekuatan. Yang mana kerja sama kedua negara menciptakan kondisi dimana kedua negara tersebut berakhir saling bergantung satu sama lain.

Interdependence complex berpendapat bahwa negara bukan salah satu aktor yang dominan, melainkan terdapat hubungan transnasional dan perusahaan multinasional yang sama pentingnya sebagai aktor yang mempunyai kepentingannya sendiri, sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan. Pada teori ini bergantung kepada karakteristik utama yang cukup mendekati terhadap permasalahan ketergantungan dua negara pada beberapa aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan lainnya.²²

Terdapat tiga ciri utama yang mendasari teori *Complex Interdependence*, yaitu :

Multiple Channels menggaris bawahi bahwa negara bukan satu-satunya pihak yang memainkan peran penting dalam membangun hubungan saling ketergantungan. Dalam hal ini, aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, LSM, pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, organisasi lintas negara dan lainnya juga memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan karena mereka memiliki kepentingan tersendiri.

²² Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence*, 1977.

Absence of Hierarchy Among Issues menunjukkan bahwa dalam hubungan antar negara terdapat berbagai persoalan yang muncul, namun tidak selalu berasal dari satu penyebab tunggal. Banyak isu yang dapat memengaruhi kepentingan aktor tertentu tanpa secara langsung mengancam keseluruhan stabilitas negara, sehingga menciptakan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda di antara para aktor, bahkan membentuk kelompok kepentingan yang beragam.

Minor Role of Military Force menekankan bahwa dalam konteks kerja sama internasional, penggunaan kekuatan militer bukan lagi menjadi instrumen utama. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan diplomasi dan kolaborasi menjadi lebih penting dalam upaya mencapai tujuan nasional.²³

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan variabel *Multiple Channels*. Karena kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan perbatasan di Muara Tami dapat dilihat melalui aktor yang bekerja sama satu sama lain. Seperti antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, masyarakat lokal, kerja sama militer, aparat perbatasan, forum-forum daerah dan LSM yang menunjang kerja sama kedua negara dalam masalah perbatasan. Yang mana dalam kerja sama kedua negara dalam masalah perbatasan, kedua negara melakukan sering melakukan pertemuan sehingga pemerintah daerah jayapura dan pemerintah papua nugini dalam forum Border Liaison Officer Meeting dan Joint Border Commite untuk membahas permasalahan di Muara Tami. Selanjutnya kedua negara menjalin kerja sama militer yang mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) telah menjalin

²³ Ibid hal 20

kerja sama dalam bentuk patroli bersama dan pertukaran informasi keamanan di wilayah perbatasan. Contohnya, Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad dan PNGDF melakukan pertemuan di Pos Komando Taktis Skouw, Jayapura, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lintas batas.²⁴

Dengan begitu, peneliti menggunakan *variable multiple channels* dari teori *Complex Interdependence* untuk mengetahui penerapan implementasi kerja sama kedua negara dalam penanganan isu perbatasan melalui tiga tingkatan aktor yang ada dalam variabel tersebut yang diterapkan dalam kerja sama perbatasan di Muara Tami. Yang mana variabel ini membantu peneliti untuk melihat bahwa keberhasilan kerja sama bukan hanya ditentukan oleh perjanjian politik tingkat tinggi, tetapi juga dengan keberagaman aktor yang ada dalam kerja sama tersebut berfungsi secara sinergis sesuai dengan tugas masing-masing di lapangan.

1.6 Konsep Border Management

Menurut pandangan Stephen Barr Jones dalam karyanya *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners* pengelolaan perbatasan suatu negara dapat diuraikan melalui kerangka teoretis yang terbagi menjadi empat tahapan utama, yaitu *Allocation, Delimitation, Demarcation, dan Administration*.²⁵

Alokasi (*Allocation*) merupakan tahap awal yang bersifat politis pada masa kolonial, tahap ini diwujudkan melalui kesepakatan antara negara-negara kolonial mengenai pembagian wilayah kekuasaan. Jones merujuk pada hasil dari tahap ini

²⁴ Muhammad Muchsin and Nur Aedah, "Implementasi Kebijakan Lintas Batas Wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea Di Kabupaten Keerom," *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 108–15.

²⁵ Dewa Gede Sudika M, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (Bnpp) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini Dewa Gede Sudika Mangku."

sebagai garis alokasi (*allocation lines*) yang secara efektif menentukan lingkaran atau batas pengaruh (*spheres of influence*). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan wilayah pada dasarnya didasarkan pada prinsip hukum internasional *uti possidetis juris*, yakni mewarisi seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa kolonial Belanda.²⁶

Tahap selanjutnya adalah Delimitasi (*Delimitation*) yang dilaksanakan setelah proses alokasi. Delimitasi diartikan sebagai proses pendefinisian batas negara secara rinci yang dituangkan dalam bentuk narasi tertulis, digambarkan pada peta, atau dimasukkan ke dalam perjanjian (*treaty*). Secara mendasar, delimitasi mencakup dua kegiatan krusial yang pertama, memilih letak pasti garis batas, yang biasanya merupakan kompromi antara pertimbangan geografis dan kepentingan politik dan kedua, mendefinisikan titik-titik batas secara presisi dalam dokumen formal seperti peta dan koordinat. Definisi garis batas ini sepenuhnya bersifat teknis kartometrik, melibatkan penentuan posisi titik batas secara teliti dan penarikan garis penghubung di peta. Tahap ini sangat kompleks karena tidak hanya mengimplementasikan aspek politik dari alokasi, tetapi juga memerlukan peran ahli hukum untuk menginterpretasikan pembagian wilayah, serta ahli geospasial (seperti kartografer atau surveyor geodesi) untuk menjamin ketelitian posisi titik dan garis batas.²⁷

²⁶ Wahyuni Kartikasari, "Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama," *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Yogyakarta*, 2012.

²⁷ Ni Made Risma Damayanthi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia*, no. 2022 (2025).

Setelah penetapan garis batas secara kartometrik pada tahap delimitasi, dilanjutkan dengan proses Demarkasi (*Demarcation*). Demarkasi adalah kegiatan penegasan batas di lapangan, yaitu mentransformasikan titik dan garis batas yang sudah disepakati di peta ke lokasi nyata. Penegasan fisik ini dilakukan dengan pembangunan tanda-tanda batas seperti tugu, pilar batas, pos jaga, atau fasilitas lainnya. Demarkasi dilaksanakan secara kolaboratif oleh Komite Teknis Survei Demarkasi dari kedua negara yang berbatasan. Peran surveyor geodesi sangat penting dalam tahap ini untuk melakukan survei pengukuran dan pemetaan, memanfaatkan teknologi dan metode ilmiah yang memadai guna menghasilkan koordinat titik batas yang akurat dan presisi di lapangan.²⁸

Terakhir adalah tahap Administrasi (*Administration*) perbatasan. Kegiatan administrasi ini dapat berjalan secara tumpang tindih (*overlapping*) dengan demarkasi, terutama mengingat kendala dan dinamika praktis di lapangan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Administrasi perbatasan adalah tindak lanjut dari penetapan batas yang berfokus pada pemisahan hak dan kewajiban antar negara. Ruang lingkup administrasi perbatasan memiliki volume pekerjaan terbesar karena melibatkan perencanaan terintegrasi dan multisektor, mencakup seluruh aspek pembangunan mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam

²⁸ Shalman Adriansyah Alghifari, "Pembaharuan Hasil Delineasi Batas Administrasi Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Metode Kartometrik," *Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu*, 2024.

kerangka bilateral, tahap administrasi inilah yang sangat lazim menjadi landasan bagi kedua negara yang berbatasan untuk menjalin kerja sama di berbagai sektor.²⁹

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif. Yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁰ Dengan begitu untuk menjelaskan dan menggambarkan "Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami", penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kerja sama antara kedua negara dalam menangani isu perbatasan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk kerja sama yang ada, tetapi juga mengkaji bagaimana kerja sama tersebut berjalan jika dilihat menggunakan variabel *Multiple Channels*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini dalam konteks permasalahan perbatasan.

1.7.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis kualitatif yang datanya dianalisis untuk menguji sebuah teori. Yang mana pada tahap awal pada teknik analisa data kualitatif mencari sumber dari beberapa pandangan yang berbeda

²⁹ Putu Wahyu Widiartana, "Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3011>.

³⁰ Sharan B. Merriam., *Research: A Qualitative Guide to Design and Implementation*. (Jossey Bass, 2009), <https://download.e-bookshelf.de/download/0003/7195/84/L-G-0003719584-0007575839.pdf>.

tetapi satu topik sesuai kebutuhan (data relevan) dengan judul penelitian ini. Setelah memperoleh data yang relevan penulis mengambil langkah menganalisa data-data tersebut sehingga dapat menarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini.

1.7.3 Level Analisa

Dari judul yang diangkat mengenai "*Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Mengatasi Permasalahan Perbatasan di Muara Tami*", penelitian ini menggunakan unit analisa kerja sama yang dilakukan kedua negara dalam menyelesaikan masalah di perbatasan yang berada pada level analisa negara-bangsa. Sedangkan unit eksplanasinya adalah bentuk kerja sama yang dilakukan kedua negara yang berada pada level analisa sistem internasional, karena kerja sama dibentuk oleh dinamika atau struktur sistem internasional. Dengan begitu penelitian ini berdasarkan level analisisnya, penelitian ini termasuk dalam tipe induksionis karena unit eksplanasinya lebih tinggi tingkatnya dibanding unit analisisnya. Dalam buku "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*" Prof. Dr. M. Mohtar Mas'ood guru besar emeritus pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa dalam tingkat analisa terdapat beberapa model hubungan antara unit analisis dan unit eksplanasi yaitu model induksionis, korelasionalis, reduksionis. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa level analisa negara-bangsa merupakan unit yang perilakunya sekedar

menanggapi apa yang terjadi dalam konteks yang lebih besar dari sistem sistem internasional-regional atau sistem global.³¹

1.7.4 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua buah variabel yaitu unit analisis (variable dependen) dan unit eksplanasi (variable independent). Unit analisa yaitu kerja sama yang dilakukan kedua negara dalam menyelesaikan masalah di perbatasan dan unit eksplanasinya adalah bentuk kerja sama yang dilakukan kedua negara.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga studi online. Yang mana penulis mencari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita-berita online yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut kemudian digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan meneliti sesuai dengan topik yang diangkat.

1.7.6 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Penulis membatasi waktu penelitian yang diambil sejak 1987 ketika Indonesia menetapkan perjanjian hubungan kerjasama "*Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea*" hingga saat ini tahun 2024.

³¹ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional.Pdf," 1990.

b. Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, batasan materi yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini berfokus pada implementasi kerjasama dalam upaya penyelesaian permasalahan perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia dan Papua Nugini.

1.8 Hipotesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan teori yang sudah dibahas sebelumnya, penulis dapat melihat bahwa permasalahan perbatasan di wilayah distrik Muara Tami seperti kejahatan transnasional sehingga memang harus diselesaikan oleh kedua pihak negara dengan cara melakukan kerjasama. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan kerja sama kedua negara dan juga kebijakan yang diambil kedua negara penulis menggunakan teori *complex interdependence* dari Robert Keohane dan Joseph Nye yang mana peneliti menekankan pada salah satu variabel yaitu *multiple channels* yang mana *multiple channels* merujuk pada keragaman dan dinamika interaksi antar aktor lintas batas. Sehingga kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan masalah perbatasan di Muara Tami akan terimplementasi secara sempurna apabila berbagai saluran komunikasi antar aktor dapat dimanfaatkan secara aktif, beragam, dan berkesinambungan. Jika dilihat dari berbagai implementasi interaksi kerja sama kedua negara dipembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memang kerja sama tersebut efektif untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah perbatasan khususnya Muara Tami. Efektivitas tersebut ditandai dengan adanya interaksi yang melibatkan banyak aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat

keamanan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat lokal dari kedua negara. Dengan begitu, adanya beberapa kerja sama yang dijalin oleh kedua negara untuk menyelesaikan masalah, hingga saat ini permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan sehingga mendorong penulis untuk memberi gambaran kerja sama yang yang di jalin menggunakan teori *complex interdependency* variabel *multiple channels* untuk melihat aktor apa saja yang ada turut andil dalam menyelesaikan isu yang ada.

1.9 Sistematika Penulisan

JUDUL	ISI
BAB I PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Teori Pengelolaan Perbatasan 1.5.2 Konsep Kerjasama Internasional 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Level Analisis 1.6.4 Variabel Penelitian 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 1.6.6 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Hipotesis 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II MASALAH TRANSNASIONAL YANG TERJADI DI PERBATASAN RI- PNG DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA KEDUA NEGARA	2.1 Geografis Wilayah Muara Tami 2.1.1 Penyelundupan narkoba 2.1.2 Aktifitas lintas batas illegal 2.1.3 Jalan tikus sebagai akses oknum kedua negara 2.1.4 Illegal logging 2.1.5 Kelompok separatis 2.2 Kerja sama dan Implementasi 2.2.1 Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation is a non-aggression pact between the governments of Indonesia and Papua New Guinea.

	<p>2.2.2 Implementasi Join Border Commite dalam kerjasama kedua negara</p> <p>2.2.3 Implementasi Border Liasion Meeting dalam kerjasama kedua negara</p> <p>2.2.4 Implementasi Joint Technical Sub Committee on Security Matters along to the Common dalam kerjasama kedua negara</p> <p>2.2.5 Implementasi Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation and Mapping dalam kerjasama kedua negara</p>
<p>BAB III KERJASAMA KEDUA NEGARA MENGGUNAKAN VARIABEL MULTIPLE CHANNELS</p>	<p>3.1 Hubungan Multiple Channels antara Indonesia dan Papua Nugini dalam isu perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.2 Hubungan Konsep Border Management antara Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.3 Multiple Channels Sebagai Dasar Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini</p> <p>3.4 Peran Kementrian Luar Negeri Indonesia dan Department of Foreign Affairs of Papua New Guinea sebagai aktor Interstate dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.5 Peran Imigrasi Jayapura sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.6 Peran BNPP sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.7 Peran TNI sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.8 Peran Bea Cukai sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.9 Peran Pemerintah Daerah sebagai aktor Transgovernmental dalam kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani permasalahan perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.10 Aktor Transnational Yang Diterapkan Dalam Kerja Sama Perbatasan di Muara Tami</p> <p>3.11 Temuan Hasil Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam Menyelesaikan Masalah Perbatasan di Muara Tami Menggunakan Multiple Channles</p>

BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran
---------------------------------	-----------------------------

